

KEBIJAKAN PUBLIK PENANGANAN SAMPAH PERKOTAAN

Implementasi Berkelanjutan
Program Broh Jeut Keu Peng



KEBIJAKAN PUBLIK

PENANGANAN SAMPAH PERKOTAAN

Implementasi Berkelanjutan
Program Broh Jeut Keu Peng

Risna Dewi, S.Sos., MSP | Maisyura, SE., MSM | Dwi Fitri, S. Sos., MA
Amirul Hanif | Ghazwatul Furqan



KEBIJAKAN PUBLIK PENANGANAN SAMPAH PERKOTAAN
Implementasi Berkelanjutan Program Broh Jeut Keu Peng

Ditulis oleh:

Risna Dewi, S.Sos., MSP | Maisyura, SE., MSM | Dwi Fitri, S. Sos., MA
Amirul Hanif | Ghazwatul Furqan

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Januari 2026

Perancang sampul: Bas

Penata letak: Bas

ISBN : -

viii + 138 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Januari 2026

PRAKATA

Kebijakan publik memiliki peranan penting dalam menentukan arah serta keberhasilan tata kelola pemerintahan. Kebijakan bukan sekadar instrumen administratif, melainkan juga cerminan tanggung jawab moral dan sosial negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Tahapan implementasi kebijakan merupakan fase yang sangat krusial karena pada tahap ini substansi kebijakan diuji dalam praktik. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan tidak semata-mata diukur dari keindahan konsepnya, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan publik secara nyata.

Salah satu isu yang merepresentasikan pentingnya implementasi kebijakan publik adalah pengelolaan sampah. Masalah ini menjadi tantangan besar bagi banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Lhokseumawe. Pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah terus meningkat, sedangkan kapasitas pengelolaan masih terbatas. Dampaknya tidak hanya berupa pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem tata kelola serta rendahnya kesadaran publik terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu program prioritas tahun 2025 dengan meluncurkan program unggulan “Broh Jeut Keu Peng” sebagai wujud komitmen untuk menciptakan kota yang lebih bersih, tertib, dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung pesan budaya

lokal yang kuat. Namun, data menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan sampah di kota ini masih cukup serius.

Buku ini hadir sebagai upaya ilmiah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan publik dalam pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe diimplementasikan, sejauh mana efektivitasnya, serta bagaimana peran budaya lokal dapat menjadi katalisator perubahan sosial menuju keberlanjutan lingkungan. Semoga buku ini dapat menjadi referensi berharga bagi para pembaca, akademisi, peneliti, maupun pemangku kebijakan yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan dan kebijakan publik berkelanjutan.

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v

BAB I

Konsep Dasar Kebijakan Publik	1
A. Pengertian Kebijakan Publik	1
B. Ciri-Ciri Kebijakan Publik	4
C. Tujuan Kebijakan Publik	6
D. Kriteria Penentuan Kebijakan Publik	16

BAB II

Perumusan Kebijakan Publik	23
A. Pengertian Perumusan Kebijakan	23
B. Model Perumusan Kebijakan	25
C. Proses Perumusan Masalah Kebijakan	33
D. Alasan Perumusan Kebijakan	35
E. Interaksi Aktor-Aktor Kebijakan Publik	37

BAB III

Implementasi Kebijakan	41
A. Definisi Implementasi Kebijakan.....	41
B. Tahapan Implementasi Kebijakan.....	45
C. Unsur-Unsur Proses Implementasi Kebijakan	46
D. Model Implementasi Kebijakan	50

BAB IV

Analisis Kebijakan	59
A. Karakteristik Analisis Kebijakan.....	59
B. Pendekatan Analisis Kebijakan	64
C. Bentuk-Bentuk Analisa Kebijakan.....	69
D. Kerangka Dasar Analisis Kebijakan.....	77
E. Kebijakan Publik dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintah	84

BAB V

Sumber, Karakteristik, dan Timbulnya Sampah	87
A. Sumber dan Timbulnya Sampah.....	87
B. Komposisi Sampah	93
C. Karakteristik Sampah	97
D. Metode Pengukuran	100
E. Sampah Berbahaya dari Rumah Tangga	104

BAB VI

Pengelolaan Sampah di Perkotaan	109
A. Pengolahan Sampah Secara Umum.....	109
B. Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen	112
C. Permasalahan Pengelolaan Sampah di Perkotaan	113

BAB VII

Penanganan Sampah Perkotaan Berkelanjutan “Broh Jeut
Keu Peng” di Kota Lhokseumawe..... 117

A. Kondisi Sampah di Kota Lhokseumawe 117
B. Program “Broh Jeut Keu Peng” di Kota Lhokseumawe 123
C. *Content of Policy* (Isi Kebijakan) 126
D. *Context of Implementation* (Konteks Implementasi) 128

Daftar Pustaka 131
Profil Penulis 135



BAB I

KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK

A. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan karena memengaruhi hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan. Melalui kebijakan publik, pemerintah berupaya memberikan arah, mengatur perilaku kolektif, serta menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat (Igrisa, 2022).

Kebijakan dapat juga dipahami sebagai sekumpulan pilihan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan siap untuk dipertimbangkan. Kebijakan lahir dari proses analisis yang mendalam terhadap berbagai opsi yang tersedia, hingga akhirnya menghasilkan keputusan yang dianggap paling tepat dan paling menguntungkan untuk diterapkan.

Dalam cakupan yang lebih luas, kebijakan publik diartikan oleh Anderson sebagai segala tindakan atau keputusan yang dilakukan maupun secara sadar tidak dilakukan oleh individu atau sekelompok aktor dalam menghadapi isu yang menjadi perhatian. Pemahaman ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya berwujud tindakan langsung atau peraturan formal, tetapi juga mencakup keputusan untuk tidak bertindak

selama pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan strategis dalam merespons suatu permasalahan (Putra dan Yusa, 2023).

Pandangan tersebut selaras dengan pemikiran Fredrich sebagaimana dikutip oleh Marwiyah (2023) yang menekankan bahwa kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang mengandung berbagai hambatan sekaligus peluang. Kebijakan dirancang sebagai respons terencana yang dapat memanfaatkan peluang yang ada sekaligus mengatasi tantangan yang muncul sehingga mampu mengarahkan proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Anggara (2014), kebijakan publik mencakup serangkaian keputusan yang saling berkaitan dan ditetapkan oleh lembaga serta pejabat pemerintah. Setiap kebijakan memiliki keterkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diarahkan untuk menentukan langkah atau tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik tersusun oleh pihak yang memiliki kewenangan resmi dan bersifat mengikat bagi masyarakat luas. Dengan mengatur kepentingan orang banyak, penyusunan kebijakan publik berada di tangan pemegang mandat yang memperoleh kepercayaan publik sebagai wakil kepentingan masyarakat.

Berbagai pandangan tersebut menggarisbawahi bahwa kebijakan publik merupakan proses multidimensional yang bersifat dinamis, melibatkan banyak aktor, dan dipengaruhi oleh konteks sosial-politik yang berubah. Kebijakan publik bukan hanya produk akhir berupa regulasi atau keputusan pemerintah, tetapi juga mencakup proses analisis, negosiasi, interpretasi masalah, serta penentuan tindakan yang paling tepat dalam rangka mencapai tujuan publik.

Keberadaan kebijakan publik menjadi elemen kunci dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat serta memastikan pengelolaan sumber daya publik berlangsung secara efektif, efisien, dan adil. Tingkat keberhasilan penyelesaian masalah publik sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirancang dengan matang dan diimplementasikan secara konsisten (Igirisa, 2022).



BAB II

PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. Pengertian Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan publik yang berfungsi menyusun dan menyeleksi berbagai alternatif penyelesaian suatu masalah. Mengacu pada pandangan Anderson yang dikutip oleh Amirudin dkk (2021), perumusan kebijakan melibatkan upaya untuk menjawab bagaimana pilihan-pilihan kebijakan dapat disepakati serta siapa saja aktor yang berperan dalam proses tersebut. Dengan kata lain, tahap ini tidak hanya menyajikan berbagai opsi penanganan masalah, tetapi juga mengatur mekanisme partisipasi dan pertimbangan yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik. Tahap ini secara khusus diarahkan untuk menghasilkan solusi yang paling relevan, efektif, dan dapat diterapkan terhadap permasalahan publik yang telah diidentifikasi.

Pembentukan kebijakan pada dasarnya berfokus pada proses ketika suatu masalah publik mulai menarik perhatian para pengambil keputusan. Pada tahap ini, berbagai usulan kebijakan disusun untuk memberikan jawaban atas persoalan yang bersifat spesifik. Setelah dirumuskan, usulan-usulan tersebut dipertimbangkan dan dipilih dari sejumlah alternatif yang saling bersaing. Pembentukan kebijakan tersusun sebagai rangkaian proses

pengambilan keputusan dalam kebijakan publik yang terdiri atas berbagai keputusan yang saling berkaitan dan berkesinambungan.

Perumusan kebijakan tidak disusun secara sembarangan, melainkan didasarkan pada sejumlah pertimbangan tertentu. Purwanto dalam Marwiyah (2022) menjelaskan bahwa terdapat beberapa asumsi yang berkaitan dengan proses berikut.

1. Proses tidak dikerjakan oleh satu aktor tunggal, melainkan melibatkan banyak pihak dengan latar belakang, kepentingan, serta perspektif yang berbeda. Keterlibatan multiaktor inilah yang membuat proses perumusan kebijakan menjadi kaya, namun pada saat yang sama juga lebih rumit.
2. Perumusan kebijakan sering kali tidak diawali dengan identifikasi masalah yang tersusun secara jelas dan sistematis. Dalam praktiknya, masalah publik kerap muncul secara bertahap, dipersepsikan berbeda oleh masing-masing aktor, dan bahkan kadang baru dipahami setelah proses perumusan berjalan. Hal ini menyebabkan kebijakan sering berkembang secara adaptif mengikuti dinamika yang terjadi.
3. Proses perumusan tidak dimiliki atau dikuasai secara eksklusif oleh satu lembaga pemerintah saja. Selain instansi pemerintah, berbagai pihak seperti organisasi masyarakat sipil, kelompok kepentingan, lembaga penelitian, hingga sektor swasta dapat mempengaruhi arah perumusan kebijakan melalui wacana, tekanan politik, ataupun rekomendasi ilmiah.
4. Formulasi kebijakan beserta reformulasi yang menyertainya dapat berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Kebijakan tidak selalu selesai dalam satu siklus, melainkan dapat mengalami revisi, penyesuaian, dan perbaikan berulang seiring perubahan kondisi sosial, ekonomi, maupun politik. Proses ini menunjukkan sifat kebijakan yang dinamis dan tidak statis.
5. Proses perumusan kebijakan melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang beragam sehingga dinamika kompetitif muncul secara alami. Dalam situasi tersebut, sebagian aktor dapat memperoleh



BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A. Definisi Implementasi Kebijakan

Peran kebijakan publik sangat menentukan arah dan keberhasilan sistem pemerintahan karena berfungsi sebagai instrumen utama dalam merespons berbagai persoalan sosial, mulai dari kemiskinan dan ketimpangan hingga perubahan iklim dan krisis lingkungan. Tahap yang paling krusial dalam siklus kebijakan terdapat pada implementasi, yaitu proses di mana kebijakan yang telah dirumuskan diwujudkan secara nyata dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Syahrudin (2019), implementasi kebijakan tidak terbatas pada aspek teknis atau administratif semata, melainkan mencakup berbagai dimensi yang saling terkait.

Menurut Grindle dalam Siraj dkk (2019), keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Isi kebijakan mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tercakup dalam kebijakan, jenis manfaat yang diberikan, derajat perubahan yang diinginkan, lokasi pengambilan keputusan, kejelasan pelaksanaan program beserta penunjukan pelaksana, serta sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan lingkungan implementasi meliputi besarnya kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat

kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut.

Pemahaman mengenai dua variabel tersebut sejalan dengan pendekatan yang diperkenalkan Merilee S. Grindle melalui konsep *“Implementation as a Political and Administrative Process”*. Pendekatan ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan bukan sekadar proses administratif, tetapi rangkaian aktivitas yang sangat dipengaruhi dinamika politik, kapasitas birokrasi, serta interaksi antar-aktor yang berperan pada pelaksanaannya. Grindle memandang bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh dua unsur pokok, yaitu konten kebijakan dan konteks pelaksanaan yang memiliki peran saling melengkapi dalam membentuk efektivitas implementasi.

Konten kebijakan mencakup substansi kebijakan, tujuan yang ingin dicapai, serta perubahan yang dituntut dari kelompok sasaran. Faktor ini meliputi sejauh mana kepentingan masyarakat terakomodasi, kejelasan manfaat yang ditawarkan, konsistensi regulasi, hingga ketersediaan sumber daya pendukung. Konten yang jelas dan realistis cenderung memudahkan pelaksana merancang langkah operasional, sementara konten yang tidak tegas atau tidak didukung sumber daya dapat memunculkan hambatan sejak awal tahap implementasi (Urip dkk., 2016).

Di sisi lain, konteks pelaksanaan menggambarkan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi proses implementasi. Stabilitas politik, dukungan masyarakat, komitmen pejabat pelaksana, kapasitas birokrasi, dan kekuatan aktor-aktor yang berkepentingan merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan kebijakan. Konteks yang mendukung dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan, sedangkan konteks yang penuh konflik kepentingan atau minim dukungan berpotensi menghambat bahkan menggagalkan implementasi. Dengan demikian, konten dan konteks merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam membentuk kualitas pelaksanaan kebijakan.

Suwitri (2011) memperkaya pemahaman ini melalui penjelasan bahwa implementasi berfungsi sebagai rangkaian upaya yang memungkinkan



BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN

A. Karakteristik Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu cara berpikir yang telah dikenal dan digunakan sejak lama dalam sejarah manusia. MacRae dalam Marwiyah (2022) menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan argumentasi rasional serta fakta-fakta untuk menjelaskan, mengevaluasi, dan menghasilkan gagasan dalam rangka memecahkan persoalan publik.

Menurut Suryadi dan Tilaar, analisis kebijakan bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan suatu pendekatan yang bertumpu pada kemampuan manusia dalam memahami realitas sosial. Analisis kebijakan dipandang sebagai rangkaian cara atau prosedur yang digunakan untuk memanfaatkan pemahaman tersebut dalam menelaah, menafsirkan, dan menyelesaikan persoalan kebijakan. Dengan kata lain, proses analisis kebijakan menuntut penguasaan konteks, identifikasi masalah, serta pemahaman terhadap potensi dampak, sehingga solusi yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjawab kebutuhan publik (Syabani, 2019).

Penyusunan suatu kebijakan sebaiknya bertumpu pada analisis kebijakan yang dilakukan secara cermat agar kebijakan yang dihasilkan

juga berkualitas. Dalam proses analisis kebijakan, terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan.

1. Titik berat analisis terletak pada upaya menjelaskan kebijakan, bukan pada memberikan rekomendasi mengenai kebijakan apa yang seharusnya diambil.
2. Penyebab serta dampak dari kebijakan publik diteliti secara mendalam dengan memanfaatkan metodologi ilmiah.
3. Analisis dilakukan untuk mengembangkan teori-teori umum yang dapat dipercaya mengenai kebijakan publik dan pihak yang membentuknya sehingga teori-teori tersebut dapat diterapkan pada berbagai lembaga dan bidang kebijakan yang berbeda (Marwiyah, 2022).

Analisis kebijakan tidak hanya terbatas pada pengolahan data dan informasi, tetapi juga mencakup seluruh aspek yang terkait dengan proses perumusan kebijakan. Proses ini meliputi identifikasi dan kajian masalah, pengumpulan informasi yang relevan, analisis mendalam, penentuan berbagai alternatif kebijakan, hingga penyampaian alternatif tersebut kepada pihak yang berwenang mengambil keputusan. Alternatif kebijakan yang dihasilkan dari proses analisis tidak serta-merta menjadi kebijakan resmi. Suatu alternatif baru dapat ditetapkan sebagai kebijakan apabila memperoleh dukungan dan legitimasi dari otoritas yang berwenang. Prosedur yang menghasilkan berbagai pilihan kebijakan tersebut merupakan suatu rangkaian kerja yang bersifat rasional.

Analisis kebijakan memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya dari bentuk kajian atau penelitian lain.

1. Terapan

Kajian analisis kebijakan umumnya lebih berorientasi pada pemecahan masalah dibandingkan pada pengembangan pengetahuan ilmiah murni. Fokusnya tidak hanya pada aspek deskriptif, tetapi juga preskriptif, terutama ketika analisis dan temuan yang dihasilkan ditujukan untuk kepentingan praktis dan pragmatis. Dalam praktiknya, analisis kebijakan membantu para pembuat kebijakan menyediakan



BAB V

SUMBER, KARAKTERISTIK, DAN TIMBULNYA SAMPAH

A. Sumber dan Timbulnya Sampah

Sampah merupakan sisa kegiatan manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang karena dianggap tidak memiliki nilai manfaat. Dalam konteks pengelolaan lingkungan perkotaan, sampah umumnya merujuk pada sampah padat yang berasal dari berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan domestik. Timbulnya sampah dipengaruhi oleh pola konsumsi, gaya hidup, tingkat ekonomi, serta perkembangan aktivitas masyarakat.

Secara umum, sumber sampah dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar yang menjadi dasar penting dalam memahami pola timbulnya sampah di masyarakat. Pengelompokan ini membantu membedakan jenis sampah yang muncul dari aktivitas sehari-hari masyarakat dengan sampah yang berasal dari kegiatan berskala teknis atau industri. Pembagian dasar ini kemudian berpengaruh pada cara pengelolaan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir sampah.

1. Sampah yang berasal dari permukiman
Sampah yang berasal dari permukiman, yaitu sampah yang timbul dari berbagai aktivitas rumah tangga yang dilakukan oleh individu

maupun keluarga. Sampah ini bersumber dari kegiatan seperti memasak, konsumsi makanan, membersihkan rumah, belanja kebutuhan harian, hingga aktivitas pemeliharaan lingkungan sekitar rumah.

Jenis sampah yang dihasilkan meliputi sisa makanan atau bahan organik, kemasan plastik dari produk konsumsi, kertas dan karton, logam atau kaleng dari minuman dan makanan, serta berbagai bahan sisa lainnya. Aktivitas yang berlangsung terus-menerus di kawasan permukiman dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat membuat sampah dari lingkungan ini menjadi salah satu kontributor utama terhadap besarnya volume sampah di daerah perkotaan.

2. Sampah dari non-permukiman yang serupa dengan sampah rumah tangga

Sumber sampah pada kelompok ini mencakup berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang berlangsung di luar kawasan hunian, misalnya pasar tradisional, supermarket dan pusat perbelanjaan, restoran, kafe, rumah makan, hotel kecil, serta berbagai kawasan komersial lainnya. Aktivitas di lokasi-lokasi tersebut menghasilkan sampah dengan wujud, komposisi, dan sifat yang sangat mirip dengan sampah permukiman, terutama dalam bentuk sampah makanan, plastik, kertas, dan bahan residu yang berasal dari kegiatan pelayanan dan perdagangan. Mengingat kemiripan tersebut, sampah dari permukiman dan sampah dari sektor non-permukiman yang serupa kemudian digolongkan sebagai sampah domestik.

Di luar kedua kelompok tersebut terdapat kategori sampah non-domestik, yaitu jenis sampah yang tidak memiliki kesamaan dengan sampah rumah tangga dan biasanya dihasilkan dari kegiatan produksi atau layanan khusus. Contoh utamanya adalah limbah industri hasil proses manufaktur, limbah medis dari rumah sakit dan klinik, limbah laboratorium, limbah konstruksi, serta residu dari bengkel dan aktivitas teknis lainnya.



BAB VI

PENGELOLAAN SAMPAH DI PERKOTAAN

A. Pengolahan Sampah Secara Umum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) menjelaskan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan manusia sehari-hari atau hasil proses alam yang berwujud padat. Sisa aktivitas tersebut perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan maupun mengganggu kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan mencakup upaya pengurangan serta penanganan sampah (Hasibuan dan Syafaruddin, 2021).

Pengurangan sampah dalam UUPS mencakup pembatasan jumlah sampah yang dihasilkan, kegiatan daur ulang, serta pemanfaatan kembali material yang masih dapat digunakan. Untuk mendukung langkah ini, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan mampu menggunakan bahan yang menghasilkan sampah dalam jumlah minimal, dapat dipakai kembali, mudah didaur ulang, dan dapat terurai secara alami. Sementara itu, penanganan sampah dimulai dari proses pemilahan, yaitu memisahkan dan mengelompokkan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifatnya. Tahap awal ini penting agar sampah dapat dikelola lebih efektif pada proses pengolahan berikutnya.

Pengelolaan sampah di kawasan perkotaan umumnya dilakukan melalui tiga tahap yang saling terhubung sebagai berikut.

1. Pengumpulan

Pengumpulan adalah proses mengambil dan mengumpulkan sampah dari tempat asalnya untuk kemudian dibawa ke lokasi penampungan sementara. Pada tahap ini digunakan berbagai sarana seperti tong sampah, bak atau peti kemas sampah, gerobak dorong, serta Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Kegiatan pengumpulan biasanya dilakukan oleh petugas kebersihan secara berkala sesuai kebutuhan dan volume sampah di setiap wilayah. Tahap ini menjadi dasar penting bagi keberlanjutan proses pengelolaan karena menentukan kelancaran langkah berikutnya.

2. Pengangkutan

Pengangkutan merupakan pemindahan sampah dari TPS menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau fasilitas pengolahan sampah. Proses ini memerlukan sarana transportasi khusus seperti truk sampah atau kendaraan pengangkut lainnya yang dirancang untuk menampung sampah dalam jumlah besar. Petugas pengangkut bekerja berdasarkan jadwal tertentu agar tidak terjadi penumpukan sampah di TPS. Keteraturan dan ketepatan waktu pengangkutan sangat memengaruhi kondisi kebersihan lingkungan perkotaan.

3. Pembuangan akhir

Pembuangan akhir ialah proses ketika sampah yang telah diangkut mengalami pemrosesan lanjutan untuk menghilangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Pemrosesan ini dapat dilakukan melalui metode fisik, kimia, maupun biologis, tergantung pada jenis sampah dan teknologi yang digunakan. Di TPA, sampah dapat diolah melalui teknik seperti penimbunan terkontrol (*landfilling*), pengomposan, pemilahan lanjutan, maupun pengolahan menjadi energi. Tujuan utama tahap ini adalah memastikan seluruh sampah ditangani secara tuntas sehingga tidak menimbulkan pencemaran air, tanah, maupun udara.



BAB VII

PENANGANAN SAMPAH PERKOTAAN BERKELANJUTAN “BROH JEUT KEU PENG” DI KOTA LHOKSEUMAWE

A. Kondisi Sampah di Kota Lhokseumawe

Lhokseumawe adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia, terletak di pesisir timur Pulau Sumatra, di antara Kota Banda Aceh dan Medan. Kota ini merupakan salah satu wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Dengan jumlah penduduk mencapai 226.462 jiwa, kota ini menghasilkan timbulan sampah harian sekitar 102,03 ton (DLH Kota Lhokseumawe, 2023). Volume sampah yang besar tersebut sebagian besar bersumber dari kegiatan rumah tangga, pusat perdagangan, fasilitas umum, serta aktivitas perkotaan lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi dan aktivitas masyarakat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah sampah yang harus ditangani setiap hari.

Meskipun angka timbulan sampah relatif tinggi, pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait fasilitas pemilahan di tingkat sumber. Hingga kini, Kota Lhokseumawe belum memiliki sarana pemilahan yang memadai seperti tempat sampah terpilah, armada angkut khusus untuk sampah pilah, maupun rumah pilah sebagai lokasi

pemisahan lanjutan. Tidak adanya fasilitas tersebut menyebabkan sampah dari jenis organik, anorganik, dan residu tetap tercampur sejak dari sumbernya. Kondisi ini menyulitkan proses pengolahan di tahap berikutnya karena sampah bercampur membutuhkan penanganan yang lebih kompleks dan memakan waktu.

Ketiadaan sistem pemilahan tidak hanya berpengaruh pada pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada proses pengangkutan dan pembuangan akhir. Sampah campuran menambah beban operasional petugas kebersihan, terutama dalam hal waktu pengangkutan, kapasitas angkut, serta penggunaan energi dan sumber daya lainnya. Beban ini semakin berat karena keterbatasan armada dan tenaga kerja yang tersedia. Akibatnya, sampah cenderung menumpuk lebih cepat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blang Peuria.

Penumpukan sampah di TPA menjadi tantangan serius, mengingat kapasitas lahan yang terbatas dan potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti pencemaran tanah, air lindi (leachate), serta bau yang mengganggu. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya penguatan sarana pemilahan dan perbaikan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Dengan penerapan pemilahan di tingkat sumber dan sistem pengolahan yang terintegrasi, tekanan terhadap TPA dapat dikurangi, dan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta berkelanjutan.

Gambar 7.1 menyajikan sumber timbulan sampah harian di Kota Lhokseumawe (Ton/Hari) berdasarkan data DLH Kota Lhokseumawe tahun 2025, yang menggambarkan kontribusi berbagai sektor terhadap total timbulan sampah yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Amirudin, Ja'far, Supiana Supiana, dan Qiqi Yuliati Zaqiah. "Perumusan Masalah Kebijakan". *Ad-Man-Pend: Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, 4(1): 25—43. 2021.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aprillia, Ricka, dan Ika Muthya Anggraini. "Strategi Pengelolaan Sampah melalui Analisis Timbulan dan Karakteristik Sampah di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat". *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 7(02): 8—12. 2019.
- Aziz, Rizki, Taufiq Ihsan, dan Datin Suhaila. "Kajian Penerapan Sistem Pengelolaan Sampah dengan Pendekatan Metode 3R di Kabupaten Padang Pariaman". *Dampak*, 17(1): 31—37. 2020.
- Crosby, Benjamin L. "Policy Implementation: The Organizational Challenge". *World Development*, 24(9): 1403—1415. 1996.
- Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. 2010. "Pengelolaan Sampah". Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma, 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik (Proses, Implementasi dan Evaluasi)*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Dwiyanto, Bambang Munas. "Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Sinergi dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan".

- Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(2): 239—256. 2011.
- Febrina Tasya Sabila, dkk. “Literasi Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Plastik di Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora Kabupaten Blora”. *Edu Geography*, 11(1): 85—92. 2023.
- Hasibuan, Rapotan dan Syafaruddin. 2021. *Problematisasi Kesehatan dan Lingkungan di Bumi Melayu*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Hayat. 2017. *Manajemen Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Igrisa, Irawaty. 2022. *Kebijakan Publik (Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris)*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Kahfi, Ashabul. “Tinjauan terhadap Pengelolaan Sampah”. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1): 12—25. 2017.
- Kumayas, Clinton Ridel, Agustinus Buche Pati, dan Welly Waworundeng. “Implementasi Kebijakan Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung”. *Sam Ratulangi Development Resource Management Review*, 1(1): 32—41. 2020.
- Kurniawan, Danang Aji, Danang Aji Kurniawan, dan Ahmad Zaenal Santoso. “Pengelolaan Sampah di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang”. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1): 31—36. 2021.
- Marwiyah, Siti. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik (Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis, dan Evaluasi Kebijakan Publik)*.
- McTigue, Clare, Tom Rye, dan Jason Monios. “The Role of Reporting Mechanisms in Transport Policy Implementation by Local Authorities in England”. *Case Studies on Transport Policy*, 6(3): 319—28. 2018.
- Muhammad Rapii, dkk. “Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Berbasis Lingkungan Masyarakat di Desa Rumbuk”. *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS*, 19(1): 13—22. 2021.

- Nafurbenan, V.V. Octovianus, Murshal Manaf, Rudi Latief, dan Syafri. 2022. *Penanganan dan Pengelolaan Persampahan*. Makassar: Penerbit Chakti Pustaka Indonesia.
- Putra, Haelvyn Pratagrahana dan Yusa Djuyandi. “Pola Komunikasi Politik dalam Proses Perumusan Pembangunan Gedung PKL Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015”. *Journal of Social and Policy Issues*, 46—49. 2023.
- Siraj, Nurudin, Agus Supriyadi, dan Nur Aulia Maulidina. “Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon”. *Jurnal Governansi*, 5(1): 47—53. 2019.
- Suryani, Anih Sri. “Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)”. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(1): 71—84. 2014.
- Sya’bani, Mohammad Ahyan Yusuf. “Penerapan Kebijakan dalam Pendidikan Islam (Studi Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan)”. *Tamaddun*, 20(1): 29—40. 2019.
- Syahrudin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Wijaya, Donny Wahyu. “Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Universitas Brawijaya*, 2(1): 82063. 2016.
- Muhammad, Kaharuddin, Sunny Ummul Firdaus dan Muhammad Hasrul La Aci. “Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat”. *Sovereignty*, 2(4): 354—368. 2023.
- Suwitri, S. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Urip Tisngati, dkk. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup di PKBM Berdasarkan Model Grindle”. *Jurnal Humaniora*, 03 (02): 333—395. Februari 2016.

PROFIL PENULIS



Risna Dewi, S.Sos., MSP, adalah seorang akademisi berbakat yang lahir di Loskala pada Februari 1982. Ia telah menjadi dosen di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh sejak tahun 2008. Lulusan Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2006, Ia melanjutkan pendidikan magister dan meraih gelar Magister Studi Pembangunan dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2011. Dedikasi Risna Dewi dalam dunia pendidikan terlihat dari peran aktifnya dalam mengembangkan dan memberikan bimbingan mendalam kepada mahasiswa. Dengan fokus pada penelitian di bidang Administrasi Publik, ia berkontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berdampak pada praktik kebijakan publik dan administrasi di Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang akademisi yang tidak hanya menguasai bidangnya tetapi juga sebagai inspirasi bagi mahasiswa dan rekan sejawat. Dengan pendekatan yang inovatif dan motivasi tinggi, ia mendorong generasi muda untuk berpikir kritis dan siap menghadapi tantangan kompleks di dunia administrasi publik. Sebagai penggerak perubahan, Risna Dewi terus berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Bagi yang ingin berinteraksi lebih lanjut, Risna Dewi dapat dihubungi melalui surel: risna.dewi@unimal.ac.id.



Maisyura, S.E., M.S.M., lahir pada 10 Mei 1975, adalah seorang akademisi yang berperan penting sebagai Dosen di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh. Dengan latar belakang akademik yang kuat, Maisyura menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di bidang Manajemen pada tahun 2001 di Universitas Malikussaleh, dan melanjutkan studi ke jenjang Magister (S2) di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, yang diraihinya pada tahun 2018. Sebagai dosen yang berdedikasi, Maisyura dikenal atas kontribusinya dalam mengembangkan ilmu Administrasi Bisnis, terutama di bidang manajemen sumber daya manusia. Ia secara aktif mengajarkan, membimbing, dan memberikan wawasan yang bermanfaat kepada mahasiswa, membantu mereka memahami konsep-konsep strategis dalam dunia bisnis. Dengan kombinasi pengetahuan akademis dan pengalaman praktis, Maisyura fokus pada pengembangan SDM yang tangguh dan inovatif. Komitmen Maisyura terhadap dunia pendidikan tak hanya tercermin dari pengajaran, tetapi juga dalam upayanya untuk terus berinovasi dan mendorong generasi muda agar siap menghadapi tantangan global. Untuk diskusi lebih lanjut atau berkomunikasi langsung, Anda dapat menghubunginya melalui surel: **maisyyura@unimal.ac.id**.



Dwi Fitri, S.Sos., M.A., lahir di Lhokseumawe pada 20 Agustus 1979, adalah seorang akademisi yang membawa wawasan global ke dalam pendidikan di Indonesia. Sebagai dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Dwi Fitri memiliki latar belakang pendidikan yang kaya. Setelah menyelesaikan gelar Sarjana di bidang Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) pada tahun 2001, ia melanjutkan studi ke Technische Universitaet Ilmenau (TU-Ilmenau),

Jerman, di mana ia meraih gelar Magister (S2) dalam Media Communication Science. Pengalaman internasional ini menjadikan Dwi Fitri sebagai figur yang kompeten dalam mengajarkan ilmu komunikasi di ranah akademik Indonesia, memperkaya mahasiswanya dengan perspektif global dan pengetahuan terkini di bidang media dan komunikasi. Dedikasinya pada pengembangan ilmu komunikasi terlihat dari peran aktifnya dalam mengajar dan membimbing mahasiswa. Untuk diskusi lebih lanjut atau informasi terkait ilmu komunikasi, Anda dapat menghubungi Dwi Fitri melalui surel: **dwifitri@unimal.ac.id**. Profilnya adalah perpaduan antara pengalaman akademis internasional dan dedikasi penuh pada pengajaran

KEBIJAKAN PUBLIK PENANGANAN SAMPAH PERKOTAAN

Implementasi Berkelanjutan
Program Broh Jeut Keu Peng



Kebijakan publik memiliki peranan penting dalam menentukan arah serta keberhasilan tata kelola pemerintahan. Kebijakan bukan sekadar instrumen administratif, melainkan juga cerminan tanggung jawab moral dan sosial negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Tahapan implementasi kebijakan merupakan fase yang sangat krusial karena pada tahap ini substansi kebijakan diuji dalam praktik. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan tidak semata-mata diukur dari keindahan konsepnya, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan publik secara nyata.

Salah satu isu yang merepresentasikan pentingnya implementasi kebijakan publik adalah pengelolaan sampah. Masalah ini menjadi tantangan besar bagi banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Lhokseumawe. Pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah terus meningkat, sedangkan kapasitas pengelolaan masih terbatas. Dampaknya tidak hanya berupa pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem tata kelola serta rendahnya kesadaran publik terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu program prioritas tahun 2025 dengan meluncurkan program unggulan “Broh Jeut Keu Peng” sebagai wujud komitmen untuk menciptakan kota yang lebih bersih, tertib, dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung pesan budaya lokal yang kuat. Namun, data menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan sampah di kota ini masih cukup serius.

Buku ini hadir sebagai upaya ilmiah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan publik dalam pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe diimplementasikan, sejauh mana efektivitasnya, serta bagaimana peran budaya lokal dapat menjadi katalisator perubahan sosial menuju keberlanjutan lingkungan. Semoga buku ini dapat menjadi referensi berharga bagi para pembaca, akademisi, peneliti, maupun pemangku kebijakan yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan dan kebijakan publik berkelanjutan.



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📘 Literasi Nusantara
📞 literasinusantara_

☎ 085755971589

Pendidikan

